



**BUPATI INDRAGIRI HULU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU  
NOMOR 48 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU  
NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN KAS PEMERINTAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI INDRAGIRI HULU,**

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 35/PMK.07/2020 tanggal 16 April 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional;
- b. bahwa menindaklanjuti Keputusan Gubernur Riau Nomor 740/IV/2020 tanggal 16 April 2020 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Penanganan Dampak Sosial Corona Virus Disease (Covid-19) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020, bahwa Kabupaten Indragiri Hulu mendapat bantuan Khusus Kelurahan untuk Penanganan COVID-19 sebesar Rp1.600.000.000 atau Rp100.000.000 X 16 Desa;
- c. bahwa menindaklanjuti Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Riau Nomor: Kpts. 144/IV/2020 tanggal 2 April 2020 tentang perubahan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Riau Nomor: Kpts. 169/IV/2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus untuk Kabupaten/Kota dalam Rangka Efektivitas Pelaksanaan Tugas Camat se Provinsi Riau;
- d. bahwa menindaklanjuti Telaah Staf Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 970/BAPENDA/IV/2020/175 tanggal 20 April 2020 Hal Penurunan Target Pendapatan Daerah Ta. 2020 berdasarkan kebijakan keuangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat untuk penangan Covid-19;
- e. bahwa menindaklanjuti Surat Kepala Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 360/KPBD-INHU/VI/2020/112 tanggal 25 Juni 2020 Hal Penyampaian Perubahan Harga Satuan TPP Berdasarkan Prestasi Kerja;
- f. bahwa menindaklanjuti Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 900/BPKAD-Sekre/608 tanggal 25 Juni 2020 Hal Penambahan Anggaran Kas BOP Kesetaraan Tahap I Ta. 2020;

g. bahwa...

- g. bahwa menindaklanjuti Surat Camat Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 900/DK/263 tanggal 17 Juni 2020 Hal usulan Perubahan DPA Kegiatan Sumber Dana DAU Tambahan;
- h. bahwa menindaklanjuti Surat Direktur RSUD Indrasari Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 445/RSUD/VI/2020/900.a tanggal 12 Juni 2020 Hal Permohonan Permintaan Perubahan Penjabaran terhadap Besaran TPP RSUD Indrasari Rengat;
- i. bahwa menindaklanjuti Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 127/SATPOL-PP/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 Hal Pergeseran Belanja Kegiatan pada APBD BL Satpol PP Tahun 2020;
- j. bahwa menindaklanjuti Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 870/SATPOL-PP/VII/2020/160 tanggal 24 Juni 2020 Hal Penyampaian Perubahan Harga Satuan TPP Berdasarkan Kondisi Kerja;
- k. bahwa menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 900/126/DPPA-Sekre/VII/2020 tanggal 29 Juni 2020 Hal Permohonan Pergeseran Aliran Kas Semester II Ta. 2020;
- l. bahwa menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 891.1/Disdikbud-Keu/VII/026 tanggal 15 Mei 2020 Hal Penyampaian Perubahan Harga Satuan TPP Berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja Ta. 2020;
- m. bahwa berdasarkan Berita Acara TAPD tanggal 29 Juni 2020 tentang Perubahan Penjabaran Ke Empat Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD TA 2020 disepakati bahwa perlu dilakukan Perubahan atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2020 dan ditindaklanjuti dengan perubahan anggaran kas;
- n. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l dan huruf m perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di lingkungan Pemerintah Daerah;

14. Peraturan...

14. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2008 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014 Nomor 16);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 101) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 37);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN KAS PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2020**

#### **Pasal I**

Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2020 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan:

1. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 13);
2. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 21);
3. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 37),  
diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal II...**

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di Rengat  
pada tanggal 2 Juli 2020

**BUPATI INDRAGIRI HULU**

**H. YOPI ARIANTO**

Diundangkan di Rengat  
pada tanggal 2 Juli 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**H. HENDRIZAL**

**BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2020 NOMOR 48.**



PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KEPALA DAERAH	dg	KEPALA DINAS .....	
KEPALA BADAN .....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	↓
KEPALA BAGIAN .....		KEPALA KANTOR/DIREKTUR RSUD	

*[Handwritten signature]*

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULLU  
 NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN KAS PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULLU  
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA SKPD	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	JUMLAH
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	115,346,524,607.14	140,315,500,241.83	126,140,385,414.42	100,898,290,352.85	482,700,700,616.24
2	Dinas Kesehatan	46,781,600,811.97	47,850,547,722.54	56,249,534,789.20	35,610,050,255.68	186,491,733,579.39
3	RSUD Indrasari Rengat	29,304,689,640.78	35,984,469,570.52	27,528,585,578.31	23,551,513,872.58	116,369,258,662.19
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	108,505,019,799.49	(23,680,627,796.00)	(30,225,206,001.16)	3,165,471,143.21	57,764,657,145.54
5	Dinas Pekerjaan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3,089,314,387.39	3,316,430,025.54	2,426,316,900.57	1,141,033,140.39	9,973,094,453.89
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1,958,053,872.95	1,719,342,857.32	1,797,918,139.29	861,944,175.57	6,337,259,045.13
7	Satuan Polisi Pamong Praja	5,630,975,847.79	5,861,928,044.63	5,939,200,902.78	5,199,692,487.68	22,631,797,282.88
8	Kantor Penanggulangan Bencana Daerah	2,549,610,749.64	2,768,897,695.55	2,324,529,035.87	1,935,829,892.78	9,578,867,373.84
9	Dinas Sosial	2,541,128,036.91	1,771,674,049.61	1,610,810,713.96	1,272,460,922.03	7,196,073,722.51
10	Dinas Tenaga Kerja	2,087,908,084.90	1,839,942,913.08	1,836,959,217.72	1,590,734,224.90	7,355,544,440.60
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,682,432,744.29	1,438,112,162.13	1,408,279,631.22	1,076,663,462.15	5,605,487,999.79
12	Dinas Ketahanan Pangan	1,808,640,899.09	1,307,916,797.46	1,567,891,390.45	1,097,683,940.07	5,782,133,027.07
13	Dinas Lingkungan Hidup	3,375,265,242.65	2,745,844,252.63	2,325,445,183.75	1,908,443,427.73	10,354,998,106.76
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,831,175,060.94	2,704,923,144.49	1,669,950,547.22	1,421,977,127.71	7,628,025,880.36
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3,960,274,990.97	2,582,893,267.97	2,188,035,638.50	1,705,960,604.23	10,437,164,501.67
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2,248,410,300.56	4,157,315,506.25	2,281,258,186.25	1,522,260,815.56	10,209,244,808.62
17	Dinas Perhubungan	5,503,924,772.11	4,494,968,533.36	3,164,827,358.34	2,296,152,244.36	15,459,872,908.17
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	3,303,970,130.56	2,840,075,365.07	1,909,663,068.00	1,899,422,253.94	9,953,130,817.57
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1,579,359,812.23	1,442,192,450.78	1,545,940,081.80	1,099,006,829.23	5,666,499,174.04
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1,594,846,529.27	1,718,869,327.45	1,623,033,791.49	1,569,911,972.27	6,506,661,620.48
21	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	4,838,982,951.53	4,131,564,453.50	2,169,488,291.14	1,338,358,205.28	12,478,393,901.45
22	Dinas Perpustakaan	1,754,320,264.79	1,387,694,521.87	1,416,672,416.90	1,158,983,251.75	5,717,670,455.31
23	Dinas Pertanian Dan Perikanan	10,174,367,398.03	8,520,027,844.52	8,702,021,790.28	6,519,160,435.20	33,915,577,468.03
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3,985,252,026.54	3,302,831,153.56	3,308,368,189.14	2,944,892,307.79	13,541,343,677.03
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4,194,221,016.77	2,857,888,124.22	2,088,184,687.60	1,618,812,287.03	10,759,106,115.62
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	736,167,165,083.55	571,626,601,470.99	287,572,851,423.77	281,844,589,804.39	1,877,211,207,782.70
27	Badan Pendapatan Daerah	39,329,035,056.67	34,439,940,520.95	33,720,901,702.86	33,337,711,213.41	140,827,588,493.89
28	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	4,135,124,991.20	3,296,747,327.51	2,965,283,108.29	2,397,676,367.21	12,794,831,794.21

NO	NAMA SKPD	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	JUMLAH
29	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	891,254,320.71	1,021,735,216.34	894,265,216.34	700,049,320.71	3,507,304,074.10
30	Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah	148,423,742.61	160,253,950.66	160,253,930.12	148,423,742.71	617,355,366.10
31	Sekretariat Daerah	23,456,616,793.18	13,383,438,867.76	15,518,194,652.04	8,788,647,635.23	61,146,897,948.21
32	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	16,531,982,316.14	14,258,586,440.60	7,866,331,251.00	6,559,835,803.00	45,216,735,810.74
33	Inspektoral	3,054,793,871.82	2,159,669,885.07	2,231,051,327.09	1,918,667,039.71	9,364,182,123.69
34	Kecamatan Rengat	6,413,107,372.66	3,657,558,315.33	4,174,530,845.49	2,913,488,900.52	17,158,685,434.00
35	Kecamatan Rengat Barat	1,854,733,243.00	1,755,942,302.64	1,738,479,102.66	1,355,943,999.00	6,705,098,647.30
36	Kecamatan Seberida	1,671,670,164.48	1,861,356,592.00	1,776,829,242.02	1,189,383,914.48	6,499,239,912.98
37	Kecamatan Batang Gansal	1,179,596,356.10	588,064,135.87	882,838,532.54	695,172,687.95	3,345,671,712.46
38	Kecamatan Batang Cenaku	1,097,730,238.18	865,330,575.27	985,228,465.28	771,210,678.28	3,719,499,957.01
39	Kecamatan Lirik	1,075,622,749.62	722,139,523.89	938,528,183.87	696,919,499.77	3,433,209,957.15
40	Kecamatan Pasir Penyau	5,632,183,949.64	1,644,068,797.67	2,786,810,997.66	1,902,630,662.25	11,965,694,407.22
41	Kecamatan Kelayang	1,637,411,155.30	1,198,788,160.41	1,181,345,839.42	895,021,098.30	4,912,566,253.43
42	Kecamatan Peranap	3,781,583,869.66	134,724,030.95	1,543,720,419.49	1,095,303,213.66	6,555,331,533.76
43	Kecamatan Kuala Cenaku	1,376,381,752.81	592,501,528.25	914,304,979.23	703,014,372.81	3,586,202,633.10
44	Kecamatan Sungai Lala	1,050,841,868.95	827,170,346.90	765,885,905.61	637,462,319.57	3,281,360,441.03
45	Kecamatan Rakit Kulim	1,161,703,399.02	658,497,304.58	908,369,600.59	689,349,868.96	3,417,920,173.15
46	Kecamatan Batang Peranap	1,353,526,117.76	402,248,987.13	631,302,669.72	575,154,435.20	2,962,232,209.81
47	Kecamatan Lubuk Batu Jaya	920,597,626.88	775,689,103.26	778,485,611.28	634,463,576.88	3,109,245,918.30
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>1,223,551,356,019.23</b>	<b>919,412,275,613.91</b>	<b>603,933,897,949.41</b>	<b>554,854,829,785.97</b>	<b>3,301,752,359,368.52</b>

<b>PARAF KOORDINASI</b>		<b>PARAF KOORDINASI</b>	
SABANG HUKUMI		KEPALA DINAS	
KEPALA BANGSIAN		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	
KEPALA BANGSIAN		KEPALA KANTOR/DIREKTUR	

BUPATI INDRAGIRI HULLU

H. YUPI ARIANTO



PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULLU  
NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN KAS PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULLU  
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA SKPD	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	JUMLAH
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	115,346,524,607.14	140,315,500,241.83	126,140,385,414.42	100,898,290,352.85	482,700,700,616.24
2	Dinas Kesehatan	41,015,572,691.47	42,084,519,602.04	50,483,506,668.70	29,844,022,135.18	163,427,621,097.39
3	RSUD Indrasari Rengat	18,018,051,513.78	25,723,889,455.52	17,781,034,469.31	13,803,962,756.58	75,326,938,195.19
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	108,192,519,799.47	(23,939,556,367.41)	(30,376,991,715.43)	3,013,685,428.91	56,889,657,145.54
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3,089,314,387.39	3,316,430,025.54	2,426,316,900.57	1,141,033,140.39	9,973,094,453.89
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1,958,053,872.95	1,719,342,857.32	1,797,918,139.29	861,944,175.57	6,337,259,045.13
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5,630,975,847.79	5,861,928,044.63	5,939,200,902.78	5,199,692,487.68	22,631,797,282.88
8	Satuan Polisi Pamong Praja	2,547,110,749.64	2,767,147,720.55	2,323,154,023.37	1,934,454,880.28	9,571,867,373.84
9	Kantor Penanggulangan Bencana Daerah	2,541,128,036.91	1,771,674,049.61	1,610,810,713.96	1,272,460,922.03	7,196,073,722.51
10	Dinas Sosial	2,087,908,084.90	1,839,942,913.08	1,836,959,217.72	1,590,734,224.90	7,355,544,440.60
11	Dinas Tenaga Kerja	1,682,432,744.29	1,438,112,162.13	1,408,279,631.22	1,076,663,462.15	5,605,487,999.79
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,808,640,899.09	1,307,916,797.46	1,567,891,390.45	1,097,683,940.07	5,782,133,027.07
13	Dinas Ketahanan Pangan	3,280,873,992.65	2,679,770,377.63	2,273,529,996.25	1,856,528,240.23	10,090,702,606.76
14	Dinas Lingkungan Hidup	1,831,175,060.94	2,704,923,144.49	2,188,035,638.50	1,705,960,604.23	7,628,025,880.36
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3,960,274,990.97	2,582,893,267.97	2,281,258,186.25	1,421,977,127.71	10,437,164,501.67
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2,248,410,300.56	4,157,315,506.25	2,874,777,358.34	2,136,222,244.36	14,647,032,908.17
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5,212,474,772.11	4,423,558,533.36	2,874,777,358.34	1,899,422,253.94	9,953,130,817.57
18	Dinas Perhubungan	3,303,970,130.56	2,840,075,365.07	1,909,663,068.00	1,099,006,829.23	5,666,499,174.04
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	1,579,359,812.23	1,442,192,450.78	1,545,940,081.80	1,099,006,829.23	6,566,661,620.48
20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1,594,846,529.27	1,718,869,327.45	1,623,033,791.49	1,569,911,972.27	12,463,393,901.45
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4,826,982,951.53	4,128,564,453.50	2,169,488,291.14	1,338,358,205.28	5,717,670,455.31
22	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1,754,320,264.79	1,387,694,521.87	1,416,672,416.90	1,158,983,251.75	33,733,357,057.03
23	Dinas Perpustakaan	10,142,117,398.03	8,487,777,844.52	8,672,971,790.28	6,430,490,024.20	12,715,217,327.03
24	Dinas Pertanian Dan Perikanan	3,690,208,026.54	3,096,299,566.06	3,146,092,807.89	2,782,616,926.54	10,759,106,115.62
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4,194,221,016.77	2,857,888,124.22	2,088,184,687.60	1,618,812,287.03	629,980,981,306.70
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	269,795,192,776.10	273,053,578,201.02	66,902,948,972.58	20,229,261,357.00	13,870,652,136.89
27	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5,723,465,857.75	2,702,353,090.82	2,914,011,838.60	2,530,821,349.72	12,794,831,794.21
28	Badan Pendapatan Daerah	4,135,124,991.20	3,296,747,327.51	2,965,283,108.29	2,397,676,367.21	3,507,304,074.10
29	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	891,254,320.71	1,021,735,216.34	894,265,216.34	700,049,320.71	617,355,366.10
30	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	148,423,742.61	160,253,950.66	160,253,930.12	148,423,742.71	617,355,366.10
	Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah					



NO	NAMA SKPD	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	JUMLAH
31	Sekretariat Daerah	23,398,616,793.18	13,325,438,867.76	15,460,194,652.04	8,751,647,635.23	60,935,897,948.21
32	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	16,531,982,316.14	14,258,586,440.60	7,866,331,251.00	6,559,835,803.00	45,216,735,810.74
33	Inspektorat	3,054,793,871.82	2,159,669,885.07	2,231,051,327.09	1,918,667,039.71	9,364,182,123.69
34	Kecamatan Rengat	6,413,107,372.66	3,657,558,315.33	4,174,530,845.49	2,913,488,900.52	17,158,685,434.00
35	Kecamatan Rengat Barat	1,854,733,243.00	1,755,942,302.64	1,738,479,102.66	1,355,943,999.00	6,705,098,647.30
36	Kecamatan Seberida	1,671,670,164.48	1,861,356,592.00	1,776,829,242.02	1,189,383,914.48	6,499,239,912.98
37	Kecamatan Batang Gansal	1,179,596,356.10	588,064,135.87	882,838,532.54	695,172,687.95	3,345,671,712.46
38	Kecamatan Batang Cenaku	1,097,730,238.18	865,330,575.27	985,228,465.28	771,210,678.28	3,719,499,957.01
39	Kecamatan Lirik	1,075,622,749.62	722,139,523.89	938,528,183.87	696,919,499.77	3,433,209,957.15
40	Kecamatan Pasir Penyu	5,632,183,949.64	1,644,068,797.67	2,786,810,997.66	1,902,630,662.25	11,965,694,407.22
41	Kecamatan Kelayang	1,637,411,155.30	1,198,788,160.41	1,181,345,839.42	895,021,098.30	4,912,566,253.43
42	Kecamatan Peranap	3,781,583,869.66	134,724,030.95	1,543,720,419.49	1,095,303,213.66	6,555,331,533.76
43	Kecamatan Kuala Cenaku	1,376,381,752.81	592,501,528.25	914,304,979.23	703,014,372.81	3,586,202,633.10
44	Kecamatan Sungai Lala	1,050,841,868.95	827,170,346.90	765,885,905.61	637,462,319.57	3,281,360,441.03
45	Kecamatan Rakit Kulim	1,161,703,399.02	658,497,304.58	908,369,600.59	689,349,868.96	3,417,920,173.15
46	Kecamatan Batang Peranap	1,353,526,117.76	402,248,987.13	631,302,669.72	575,154,435.20	2,962,232,209.81
47	Kecamatan Lubuk Batu Jaya	920,597,626.88	775,689,103.26	778,495,611.28	634,463,576.88	3,109,245,918.30
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>705,423,013,015.34</b>	<b>572,377,112,669.40</b>	<b>336,199,075,108.94</b>	<b>246,266,080,531.84</b>	<b>1,860,265,281,325.52</b>

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
NABABG HUKUM	<i>pkj</i>	KEPALA DINAS	
KETUA BAK/RSK		KEPALA GADANG/INSPEKTOR	
KEPALA BAK/RSK		KEPALA BAK/RSK/INSPEKTOR	

BUPATI INDRAGIRI HULLU

H. YUPI ARIANTO

*[Handwritten signature]*



NO	Kode SKPD	Nama SKPD	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Jumlah
41	5.06.13.00	Kecamatan Kelayang	371.606,366,10	415.998,751,10	840.806,038,10	1.117.167,366,10	654.366,206,79	135.587,001,10	530.285,097,22	355.503,511,10	391.556,831,10	334.888,986,10	281.684,061,10	278.448,101,10	4.912.566,253,43
42	5.06.14.00	Kecamatan Peranap	487.397,967,22	1.250.510,457,22	2.043.675,445,22	555.160,547,22	784.690,883,49	364.254,467,22	785.256,185,05	398.559,767,22	358.904,467,22	377.914,667,22	357.629,467,22	359.759,079,22	6.555.311,333,76
43	5.06.15.00	Kecamatan Kuala Cereku	472.570,508,27	552.719,020,27	351.097,224,27	350.700,043,73	7.560,839,75	249.362,324,27	476.472,830,69	241.544,824,27	246.287,824,27	234.327,224,27	234.337,224,27	234.337,224,27	3.586.202,633,10
44	5.06.16.00	Kecamatan Sungai Lela	328.022,873,19	312.438,473,19	410.380,522,57	318.202,973,19	289.825,300,52	219.142,073,19	376.886,059,23	228.046,573,19	210.993,273,19	220.078,373,19	216.517,873,19	200.866,073,19	3.281.360,441,03
45	5.06.17.00	Kecamatan Paurit Kulim	380.377,656,34	459.813,956,34	321.511,896,34	321.511,896,34	46.604,707,90	254.086,806,34	426.884,987,91	247.906,806,34	233.577,306,34	195.827,478,40	189.663,478,40	189.663,478,40	2.962.232,209,82
46	5.06.18.00	Kecamatan Sraang Peranap	400.841,178,40	439.101,566,96	513.582,978,40	247.648,678,40	246.673,512,89	92.073,204,16	251.975,712,92	189.663,478,40	271.876,358,96	204.368,038,96	207.532,358,96	222.563,158,96	3.109.245,918,30
47	5.06.19.00	Kecamatan Lubuk Batu Jaya	298.232,358,96	296.176,258,96	326.189,008,96	317.677,138,96	254.879,585,34	203.132,358,96	289.237,485,36	271.876,358,96	217.381,766,96	76.886,674,940,39	71.386,456,741,71	97.993,009,749,74	1.860.265,281,325,52
<b>Jumlah TOTAL</b>			<b>112.650.948.959,22</b>	<b>143.686.543.894,18</b>	<b>440.085.520.161,94</b>	<b>109.841.467.518,40</b>	<b>146.973.031.675,73</b>	<b>315.612.613.475,27</b>	<b>157.456.411.880,92</b>	<b>69.592.192.364,12</b>	<b>109.150.470.863,90</b>	<b>76.886.674.940,39</b>	<b>71.386.456.741,71</b>	<b>97.993.009.749,74</b>	<b>1.860.265.281.325,52</b>

<b>PARAF KOORDINASI</b>		<b>PARAF KOORDINASI</b>	
KABANG HUKUM		KEPALA DINAS .....	
KEPUCUK DASGAN .....		KEPALA BADAN/INSPEKTOR	
KEPALA KASIAN .....		KEPALA KANTON/CHIEF OF	

*(Handwritten signature 'Day' in blue ink)*

**BUPATI INDRAGIRI HULLU**  
*(Handwritten signature in blue ink)*  
**H. YOPi ARIANTO**

*(Handwritten signature in blue ink)*